

KEADAAN PERANG IRAK-IRAN DAN IMPLIKASI-IMPLIKASINYA

Kirdi DIPOYUDO

Dalam perang Irak-Iran yang berkobar sejak September 1980, pada bulan Juli 1982 Iran melancarkan serangan balasan di daerah Basra. Serangan ini dimaksud untuk memungkinkan pasukan-pasukan Iran merebut wilayah di jantung Irak. Akan tetapi serangan itu gagal dan tentara Iran maupun para Pengawal Revolusi Iran menderita banyak korban jiwa. Sebagai akibatnya pimpinan Iran memutuskan untuk *menggeser usaha pokoknya ke sektor Dezful-Amara*, sambil mengembangkan suatu usaha sekunder di sektor Qasr Shirin. Keputusan ini mengungkapkan penilaian Iran bahwa suatu serangan langsung di daerah Basra tidak akan berhasil mengingat penyusunan pertahanan Irak dan kondisi medan, yaitu suatu sektor sempit dan datar antara rawa-rawa dan Sungai Shatt al-Arab. Keputusan itu juga mengungkapkan dicapainya suatu kompromi dalam pimpinan antara mereka yang mendukung suatu serangan jauh ke dalam wilayah Irak dan mereka yang menentangnya.

PERSIAPAN PERTEMPURAN PEBRUARI

Bulan Nopember 1982 pasukan-pasukan Iran melancarkan suatu serangan di sektor Amara dan Mandali. Mereka mencapai suatu sukses terbatas dan berhasil merebut beberapa kantong yang masih dikuasai Irak di bumi Iran. Setelah pertempuran itu berakhir, Iran memperkuat pasukan-pasukannya di sektor Dezful-Amara dengan maksud untuk melancarkan suatu serangan baru di situ.

Menjelang waktu serangan baru itu dimulai, kekuatan Iran terdiri atas 2 divisi panzer; 3 divisi infanteri; 12 brigade infanteri Pasdaran; 2 brigade komando; puluhan ribu sukarelawan (Basij); dan sekitar 400 tank dan panzer. Sebaliknya kekuatan Irak meliputi 2 divisi panzer; 1 divisi bermotor; 2 divisi

infanteri; sekitar 20 brigade kebanyakan infanteri; dan sekitar 1.000 tank dan panser yang tersedia bagi pasukan-pasukan itu.

OPERASI FAJAR

Serangan Iran yang diberi nama *al-Fajr* (Fajar) itu dilancarkan pada malam 6/7 Pebruari 1983. Menurut pernyataan-pernyataan Iran maksud serangan itu adalah *merebut kota Amara* (sekitar 70 km sebelah barat perbatasan) dan *memotong poros Bagdad-Amara-Basra*. Ada informasi bahwa Iran bermaksud menyerahkan wilayah itu kepada "Dewan Revolusi Tertinggi" pimpinan Bakr al-Hakim, suatu kelompok oposisi Irak yang dibentuk di Iran pada bulan Nopember 1982 sebagai semacam mantel organisasi untuk organisasi-organisasi oposisi Irak.

Sampai 16 Pebruari pasukan-pasukan Iran melancarkan 6 serangan dengan satuan-satuan dari berbagai divisi termasuk brigade-brigade angkatan darat dan satuan-satuan Pasdaran. Akan tetapi semua serangan itu mengalami *kegagalan*. Pasukan-pasukan Iran dipukul mundur dengan banyak korban jiwa. Satu-satunya hasil adalah suatu jalur di wilayah Iran yang sebelumnya dikuasai infanteri Irak.

Faktor-faktor kegagalan serangan Iran itu adalah sebagai berikut: (1) kemampuan pertahanan Irak yang tinggi di daerah yang dikuasainya, yang dilandasi suatu garis kubu-kubu dan rintangan-rintangan yang efektif dan disiapkan dengan baik; (2) penggunaan intensif pesawat tempur dan helikopter Irak di mana Angkatan Udara Irak lebih agresif dan juga menyerang pada malam hari; (3) intelijen Irak yang baik mengenai penilaian maksud-maksud Iran dan jalannya pertempuran; dan (4) disiplin dan semangat tempur yang baik di antara pasukan-pasukan Irak.

Akan tetapi sebagian terbesar kegagalan Iran itu adalah *akibat kesalahan-kesalahannya sendiri*. *Pertama*, persiapan serangan itu makan waktu begitu banyak sehingga Irak mampu bersiap-siap dan menangkisnya. Iran membutuhkan persiapan lama itu karena kekurangan pengangkutan logistik dan kekurangan senjata dan amunisi perorangan yang serius. *Kedua*, dalam pertempurannya itu sendiri Iran membuat penilaian salah mengenai kekuatan militer Irak di rusuk selatan front. *Ketiga*, tiada dukungan dan kelanjutan pendorongan awal oleh pasukan Pasdaran, mungkin karena tiada kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan pasukan di medan, tiada keluwesan secukupnya dalam pertempuran, dan tiada koordinasi yang baik antara Pasukan Pasdaran dan tentara reguler yang sering berselisih. *Keempat*, tiada dukungan udara dan Angkatan Udara Iran hampir tidak pernah menyerang sasaran-

sasaran di darat. *Kelima*, hanya terdapat sedikit dukungan artileri (2-3 batalyon). *Keenam*, di antara pasukan Iran moral dan kesediaan untuk mengorbankan diri sangat menurun. Misalnya untuk pertama kalinya dalam perang ini komandan-komandan Iran ditembak mati atas tuduhan mundur dari medan pertempuran.

Kerugian Iran menurut laporan-laporan Irak adalah 11.000 - 18.000 orang tewas atau luka-luka (perkiraan masuk akal adalah 5.000 - 10.000 orang) dan 100 tank, 80 panser dan 2 pesawat tempur. Sebaliknya kerugian Irak menurut laporan-laporan Iran adalah 3.500 orang tewas (perkiraan masuk akal adalah 3.000 orang) dan 40 tank serta panser, 8 pesawat tempur (perkiraan masuk akal adalah 5) dan 1 helikopter.

Sejak akhir usaha terakhir Iran untuk menyerang Irak pada 16 Pebruari itu terjadi *pertempuran statis di semua sektor* yang ditandai duel artileri. Irak juga mengerahkan angkatan udaranya untuk menyerang sasaran-sasaran di darat maupun instalasi-instalasi minyak dan kapal-kapal tanki Iran yang berlayar di bagian utara Teluk.

IMPLIKASI UNTUK IRAN

Dengan demikian tercipta suatu situasi yang tidak memberikan kemungkinan apa pun kepada salah satu pihak untuk mencapai kemenangan dalam waktu dekat ini. Iran mempunyai pilihan *antara dua operasi militer*, yaitu melancarkan suatu serangan baru secara besar-besaran untuk mencapai tujuan semula operasinya, yang melibatkan semua atau kebanyakan kekuatan yang tersedia baginya di sektor itu, atau melepaskan gagasan untuk merebut wilayah jauh di pedalaman Irak dan secara demikian menyimpan kekuatannya dan menghindari kekalahan, sementara melancarkan operasi-operasi terbatas sepanjang perbatasan dengan maksud untuk menguras kekuatan Irak, termasuk usaha untuk merebut kembali jalur-jalur wilayah perbatasan yang masih dikuasai oleh Irak.

Pada hemat kami pimpinan Iran telah menyadari bahwa angkatan darat dan Pengawal Revolusi *boleh jadi tidak mampu untuk mencapai kemenangan yang menentukan di medan tempur dengan suatu serangan langsung*. Akan tetapi pimpinan rupanya masih berpegang pada keputusannya untuk mencapai suatu kemenangan militer yang menentukan yang akan memungkinkannya memaksakan tuntutan-tuntutannya pada Irak dan menyebabkan jatuhnya rezim Saddam Hussein. Para pemimpin Iran masih percaya bahwa perang ini menguntungkan kepentingan-kepentingan Iran atau paling tidak kepentingan-kepentingan rezim. Mereka ingin mempertahankan garis yang mereka ambil

pada awal perang untuk menggunakan perang sebagai sarana guna mempertahankan dan mengkonsolidasikan pemerintah, yaitu: (1) mengerahkan massa rakyat untuk mendukung pemerintah; (2) sebagai suatu kesempatan untuk menyingkirkan angkatan darat dari pusat negara dan secara demikian menutup kemungkinan intervensi militer dalam perebutan kekuasaan dalam negeri; dan (3) sebagai dalih yang baik untuk kesulitan-kesulitan ekonomi Iran.

Pimpinan Iran rupanya percaya bahwa kemampuan Iran untuk bertahan dalam perang adalah lebih tinggi daripada kemampuan Irak. Penilaian mereka ini didasarkan atas kuatnya kembali ekonomi Iran, yang terutama adalah akibat meningkatnya kembali produksi dan ekspor minyak yang bulan-bulan belakangan ini mencapai 2,5 juta barrel per hari.

Pada hemat kami dalam keadaan seperti itu *Iran tidak akan memperlunak syarat-syaratnya* untuk mengakhiri peperangan, dan bahwa pimpinan Iran bermaksud untuk meneruskan peperangan, biarpun memikirkan perubahan taktik, dari serangan frontal ke *perang pengurusan tenaga*.

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa keputusan Iran untuk tidak puas dengan pengusiran pasukan Irak dari wilayah Iran saja dan untuk berusaha membawa peperangan jauh ke dalam wilayah Irak dan kegagalan usaha itu mempunyai berbagai akibat. *Pertama*, kerugian besar yang diderita di front menyebabkan menurunnya moral di kalangan rakyat Iran. *Kedua*, dalam pimpinan politik maupun komando militer tertinggi perbedaan-perbedaan meningkat mengenai tujuan-tujuan perang dan cara untuk mencapainya. *Ketiga*, moral dalam angkatan darat dan *Pasdaran juga menderita* sehingga terjadi desersi-desersi, dan perselisihan antara kedua badan itu maupun tiadanya koordinasi antara mereka meningkat.

IMPLIKASI-IMPLIKASI UNTUK IRAK

Biarpun Irak berhasil memukul mundur serangan-serangan Iran yang terakhir, *situasinya tetap sulit* karena ia tidak dapat memaksakan suatu keputusan dalam perang dan tidak mampu mengakhirinya. Di tingkat militer inisiatif tetap di tangan Iran dan pada hemat kami inisiatif militer Irak tidak dapat diharapkan. Di tingkat politik, Irak berulang kali menyatakan bersedia memulai perundingan-perundingan dan mendukung pernyataan itu dengan menarik pasukannya dari Iran dan dengan menunjukkan kesediaannya untuk membicarakan reparasi-reparasi perang seperti dituntut oleh Iran. Namun di tingkat politik inisiatif juga di tangan Iran karena Irak tidak dapat menerima syarat-syarat Iran untuk mengakhiri peperangan, sekurang-kurangnya tidak di bawah rezim sekarang ini.

Pada hemat kami kemampuan Irak untuk menangani terus berlanjutnya perang terutama akan dipengaruhi oleh situasi ekonominya. Sejak akhir 1982 ada tanda-tanda bahwa *ekonomi Irak memburuk*. *Pertama*, pukulan-pukulan yang diderita dalam sektor minyak mengurangi ekspor minyak Irak sampai tingkatnya sekarang ini sebanyak 700.000 barrel per hari. Minyak yang dipompa lewat pipa minyak ke Turki dan dijual dengan harga OPEC kini adalah satu-satunya sumber pendapatan Irak. *Kedua*, biaya perang Irak kini ditaksir $1\frac{1}{2}$ - 2 milyar dollar per bulan. *Ketiga*, menurut perkiraan para ahli pendapatan Irak hanya menutup sepertiga kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai akibatnya cadangan valuta asing Irak menurun dari US\$ 30 milyar sebelum perang menjadi US\$ 5 milyar sekarang ini. *Keempat*, usaha pembangunan Irak berhenti untuk pertama kalinya sejak awal perang. Tender-tender dibatalkan dan beberapa proyek pembangunan seperti jalan kereta api Bagdad-Basra dibekukan. *Kelima*, kesejahteraan orang-orang yang dipertahankan oleh rezim sejak awal perang rupanya juga mulai menurun. Misalnya mulai dilaporkan adanya kekurangan bahan-bahan pokok, impor pribadi dilarang, transfer valuta asing ke luar negeri dibatasi dan ini juga berlaku untuk tenaga kerja asing. Akhirnya, sejak Oktober-Nopember 1982 Irak tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada para pensuplai militer dan sipil.

Keharusan untuk meneruskan peperangan dalam keadaan ini akan *meningkatkan ketergantungan Irak pada negara-negara lain* seperti Arab Saudi dan negara-negara teluk lain, yang telah memberinya sekitar US\$ 20 milyar bantuan keuangan langsung sejak pecahnya perang dan sekitar US\$ 12 milyar tahun 1982, dan Jordania. Ketergantungan ini telah memberikan pukulan berat kepada kedudukan Irak sebagai suatu faktor terkemuka dan berwibawa di Dunia Arab dan kepada klaimnya atas suatu kedudukan dominan di Teluk.

Kebutuhan Irak akan bantuan dari negara-negara Barat dalam bentuk suplai militer dan bantuan ekonomi juga meningkat. Misalnya sejak Desember 1982 Amerika Serikat menyetujui US\$ 370 juta bantuan keuangan untuk Irak dan Irak juga minta penangguhan pembayaran hutang-hutangnya kepada Perancis, Jerman Barat dan lain-lain negara Barat.

Bersamaan dengan itu Irak terus mempertahankan dan membina hubungannya dengan Uni Soviet. Maksud utamanya adalah menjamin terus mengalirnya suplai militer agar mampu terus menggunakan sistem-sistem senjata Eropa Timur dalam arsenalnya. Suatu persetujuan senjata Uni Soviet-Irak ditandatangani bulan Pebruari 1983. Irak juga berusaha membujuk Uni Soviet agar meyakinkan Iran untuk merundingkan penghentian peperangan. Cina juga merupakan suatu sumber suplai yang penting. Demikianpun Mesir.

Menurut penilaian kami, *kebutuhan-kebutuhan Irak untuk perangnya dengan Iran akan terus merupakan faktor dominan dalam kebijaksanaan Irak* dan akan menentukan sikapnya mengenai soal-soal Arab, mengenai sengketa Arab-Israel dan dalam hubungannya dengan negara-negara besar.

Di arena dalam negeri, berlanjutnya perang, khususnya kalau hal itu membuat parah perekonomiannya, bisa memberikan suatu pukulan terhadap salah satu hasil rezim Irak yang penting, yaitu *keberhasilannya mempertahankan stabilitasnya dan dukungan untuk kepemimpinan Saddam Hussein*. Keberhasilan ini lebih menyolok karena dapat dicapai biarpun dalam perang yang berlangsung dua tahun lebih tidak dicatat hasil yang berarti. Dapat disebutkan faktor-faktor berikut. *Pertama*, pengawasan ketat dinas-dinas keamanan dalam negeri dan reaksi keras terhadap setiap tindakan subversi. Misalnya penghancuran desa Dujayl menyusul usaha pembunuhan terhadap Saddam Hussein bulan Juli 1982. *Kedua*, kenyataan bahwa penduduk Shia sebagai keseluruhan mendahulukan loyalitasnya kepada Irak daripada loyalitas komunal keagamaannya. *Ketiga*, perpecahan dalam oposisi Irak yang tidak mampu menemukan suatu denominator bersama untuk semua kelompok (umat Islam Shia, bangsa Kurdi, golongan komunis). Perpecahan itu bahkan menjadi lebih parah karena kelompok-kelompok oposisi itu terikat dengan berbagai negara (terutama Suriah, Irak dan Libya). Pada 15 Pebruari 1983, 19 kelompok oposisi yang bertemu di Libya mengumumkan bahwa mereka akan bersatu tetapi sejauh ini tidak mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk maksud itu. *Keempat*, tiadanya tanggapan penduduk Irak atas tindakan-tindakan oposisi. Misalnya selama enam bulan terakhir hanya terjadi dua tindakan teroris di Bagdad. Akhirnya, keteguhan loyalitas kepada Saddam Hussein dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya di pihak angkatan darat dan Partai Baath.

Pemerintah Irak sadar akan bahaya potensial memburuknya perekonomian dan mengambil *sejumlah tindakan* sehubungan dengan itu. *Pertama*, dilakukan usaha-usaha untuk menjelaskan kepada rakyat Irak perlunya "ekonomi perang" dan tindakan-tindakan penghematan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasional. *Kedua*, seperti dikatakan di atas tengah dilakukan usaha untuk mendapatkan bantuan keuangan luar negeri dan memperlunak syarat-syarat pembayaran hutang pemerintah. *Ketiga*, dilakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan Irak dengan: (1) meningkatkan jumlah minyak yang disalurkan lewat pipa Turki menjadi 900.000 barrel per hari; (2) mengusahakan dipercepatnya pelaksanaan proyek pipa minyak ke Laut Merah lewat Arab Saudi; dan (3) membujuk Suriah untuk membuka kembali pipa minyak Irak yang melewati wilayahnya. Tetapi sejauh ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Arab Saudi (Januari 1983) dan oleh Perancis selama kunjungan Menlu Cheysson ke Damaskus (Pebruari 1983) atas nama Irak tidak berhasil.

Irak juga *meneruskan usahanya agar diadakan perundingan* untuk mengakhiri peperangan lewat negara-negara besar, lewat PBB (suatu himbauan kepada Dewan Keamanan pada waktu serangan bulan Pebruari 1983) dan lain-lain organisasi internasional seperti gerakan Non-Blok maupun negara-negara masing-masing seperti Aljazair.

Akan tetapi dalam jangka panjang berlanjutnya tekanan Iran bisa mendorong Irak untuk melaksanakan ancamannya untuk menggunakan senjata non-konvensional terhadap sasaran-sasaran di Iran. Sebaliknya juga mungkin bahwa kalau rezim atau kedudukan Saddam Hussein menjadi lebih lemah, akan muncul suatu kelompok dari dalam tubuh rezim atau dari luarnya yang akan mengganti rezim atau paling tidak menyingkirkan Saddam Hussein. Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa menurut desas-desus di Bagdad, pada awal Pebruari 1983 atau Maret ada usaha yang gagal untuk melancarkan suatu kudeta.

POSISI NEGARA-NEGARA TELUK

Sejak pecahnya perang Irak-Iran, kebijaksanaan yang dianut negara-negara Teluk didasarkan atas persepsi mereka mengenai *ancaman Iran terhadap keamanan mereka* dan mengenai *cara menghadapi ancaman itu*. Negara-negara ini sadar bahwa mereka tidak mampu mencegah serangan atau invasi Iran ke dalam wilayah mereka dan oleh sebab itu mereka berhati-hati untuk tidak memberikan dalih apa pun bagi tindakan semacam itu dan berusaha mempertahankan koeksistensi damai dengan negara tetangga yang kuat itu. Selaras dengan sikap itu, negara-negara Teluk menyatakan kenetralan mereka pada awal peperangan dan tidak mengumumkan bantuan logistik yang mereka berikan kepada Irak. Dalam kenyataan mereka mendapat keuntungan dari perang itu karena tercipta suatu situasi yang memberi mereka ruang manuver yang lebih besar.

Pada musim panas 1982 ketika Iran untuk pertama kalinya mengancam sasaran-sasaran di Irak, negara-negara Teluk lewat diplomasi berusaha menghentikan peperangan sebelum Iran menyerbu Irak akan tetapi sia-sia. Alasan di belakang usaha itu adalah ketakutan mereka bahwa suatu kemenangan Iran yang cepat akan membakar penduduk Shia di Teluk dan memberi hati kepada Iran untuk mengeksplor revolusi. Ketakutan ini berkurang ketika Irak ternyata berhasil memukul mundur serangan Iran dan Iran menemui kesulitan-kesulitan dalam negeri. Secara demikian disiapkan bagi Dewan Kerja Sama Teluk untuk menyatakan dukungannya bagi Irak pada KTT Arab di Fez. Resolusi-resolusi Fez, yang pada KTT Dewan Kerja Sama Teluk (Nopember 1982) diajukan sebagai posisi dewan mengenai perang itu, adalah sebagai berikut: (1) pernyataan mendukung Irak; (2) seruan agar perang dihentikan lewat

perundingan-perundingan; dan (3) suatu peringatan bahwa bila Iran menyerbu Irak, Pakta Keamanan Kolektif Arab bisa dioperasikan.

Resolusi-resolusi itu kelihatan sebagai kompromi antara negara-negara yang menginginkan suatu posisi pro-Irak yang lebih aktif dan negara-negara yang merasa bahwa kebijaksanaan semacam itu tidak akan membantu Irak dan akhirnya akan merugikan negara-negara Teluk itu sendiri. Perbedaan-perbedaan dalam hal ini berkaitan dengan hubungan bilateral masing-masing negara Teluk dengan Irak dan Iran dan dengan tekanan yang dilakukan oleh kedua negara ini atas negara-negara Teluk. Di samping kendala-kendala ini, terdapat beban ekonomi yang diletakkan oleh perang Irak-Iran atas negara-negara Teluk, khususnya atas Arab Saudi dan Kuwait sehubungan dengan menurunnya pendapatan ekspor minyak mereka. Tetapi kendati pertimbangan-pertimbangan ini, tampak bahwa negara-negara Teluk merasa harus *meneruskan bantuan mereka untuk Irak* agar penghentian bantuan semacam itu tidak mengakibatkan kemenangan Iran yang dalam jangka panjang akan juga akan mengancam mereka. Bersamaan dengan itu negara-negara Teluk memutuskan pada konperensi menteri luar negeri mereka tanggal 20 Pebruari 1983 untuk meneruskan usaha mereka menghentikan peperangan dengan perantaraan gerakan Non-Blok, PBB dan Organisasi Konperensi Islam.

Para anggota Dewan Kerja Sama Negara Teluk juga menggunakan berlanjutnya peperangan Irak-Iran untuk *memperkuat dan memperluas kerja sama antara mereka*. Konperensi menteri luar negeri bulan Pebruari itu juga membahas rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh menteri-menteri pertahanan mereka, yang juga mengusulkan pembentukan suatu kekuatan militer gabungan negara-negara Teluk. KTT Nopember 1982 telah menyetujui rekomendasi-rekomendasi para menteri pertahanan mereka seperti berikut: (1) membentuk suatu staf gabungan untuk mengkoordinasi kegiatan angkatan-angkatan laut, udara dan darat mereka; (2) membentuk suatu sistem pertahanan udara gabungan; (3) mengkoordinasi program-program pembelian dan latihan militer mereka; dan (4) tukar-menukar delegasi-delegasi militer.

Menurut laporan-laporan belakangan ini, ada kontak-kontak tingkat tinggi, dalam kerangka Dewan Pertahanan Teluk, untuk mengadakan koordinasi manuver-manuver gabungan mendatang. Bila laporan ini benar, kontak-kontak itu bisa merupakan langkah-langkah pertama menuju implementasi kerja sama militer.

Pada 1 Maret 1983 anggota-anggota Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk juga mulai melaksanakan tahap pertama persetujuan ekonomi mereka. Ini meliputi: (1) penghapusan bea masuk barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara anggota dan diperdagangkan antara mereka; (2) kemudahan

gerak buruh dari negara ke negara dan penampungan mereka; dan (3) pemberian akses bebas ke pelabuhan-pelabuhan keenam negara anggota kepada kapal-kapal salah satu anggota.

Perlu diingat bahwa pada KTT Nopember 1981 Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk menyetujui rencana integrasi ekonomi mereka, yang didasarkan atas model Pasaran Bersama Eropa, dan setahun kemudian menyetujui usul-usul implementasi rencana itu.

Mengenai kerja sama dalam bidang keamanan di antara negara-negara anggota Dewan Negara-negara Teluk, tidak dicapai kemajuan sejak diadakannya persetujuan-persetujuan keamanan bilateral antara Arab Saudi dan lain-lain negara anggota -- kecuali Kuwait -- pada awal 1982. Persetujuan keamanan, di tingkat Dewan, masih dalam pertimbangan dan penandatanganannya dihambat oleh Kuwait yang mempunyai reservasi-reservasi mengenai sementara ketentuannya, yang menurut para pemimpin Kuwait bertentangan dengan konstitusi Kuwait. Pemerintah Kuwait baru-baru ini mengajukan usul-usul amandemen konstitusi kepada Dewan Nasional (parlemen), tetapi tidaklah jelas apakah usul-usul ini berkaitan dengan persetujuan keamanan menyeluruh Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk, atau dengan soal-soal intern Kuwait.

Sebagai ringkasan, kelihatannya negara-negara Teluk lebih senang melihat perang Irak-Iran berakhir, biarpun berlanjutnya peperangan itu memberi mereka kebebasan manuver yang lebih besar. Akan tetapi sementara ini mereka rupanya tidak mampu mempengaruhi jalannya kejadian-kejadian sehubungan dengan perang Irak-Iran itu.